

Perlawanan nelayan lokal terhadap pelanggaran nelayan asing Thailand :Studi kasus nelayan Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan Kabupaten Natuna

Yanin Kholison, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=108111&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini bertujuan untuk menggambarkan potret perjuangan nelayan di kepulauan Anambas dalam mengatasi keberadaan kapal asing di wilayah tradisional mereka beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi perjuangan tersebut.

Wilayah kepulauan Anambas memiliki potensi dan hasil ikan yang cukup besar. Selain itu wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia Barat. Oleh karena itu, dengan potensi dan letak wilayah Kepulauan Anambas yang demikian, maka wilayah ini sangatlah rentan terhadap aksi eksploitasi sumber daya laut secara Regal, terutama dari pihak asing

Secara teoretis, laut dengan segala isinya sesungguhnya merupakan suatu sumber daya (resource) yang tergolong ke dalam public property resource. dimana laut sebagai sumber daya merupakan milik umum, di mana setiap orang dapat mengakses sumber daya tersebut. Oleh karena itu, orang cenderung berlomba-lomba melakukan eksploitasi sumber daya laut yang kemudian menyebabkan sumber daya laut menjadi semakin berkurang dan terbatas. Akan tetapi, masalah adalah ketika eksploitasi tersebut sudah mulai masuk ke wilayah tangkapan (fishing ground) nelayan lokal yang merupakan hak komunitas, apalagi dengan menggunakan peralatan yang justru merusak biota laut. Akibatnya, konflik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, terlebih-lebih jika aparat turut bermain tentu akan menambah permasalahan semakin kompleks.

Fenomena di atas terjadi di Kepulauan Anambas di mana nelayan lokal melakukan perlawanan terhadap terhadap aksi illegal fishing nelayan Thailand

dan terhadap aparat keamanan (Angkatan Laut) dianggap turut andil dalam memelihara keberadaan nelayan-nelayan Thailand. Untuk mengkaji masalah perjuangan perlawanan nelayan Anambas ini, digunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-ekplanatif. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik dari permasalahan ini, digunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, baik kepada saksi maupun para aktor perjuangan nelayan dan melakukan observasi langsung di lokasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian literatur terhadap berbagai dokumen dan bahan kepustakaan yang terkait. Sebagai satuan unit analisa, wilayah penelitian berada di Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan perlawanan yang dilakukan oleh nelayan Anambas

terhadap kapal asing Thailand dilatarbelakangi oleh multi dampak negatif yang dirasakan masyarakat dan keluarga nelayan; dampak ekonomi, lingkungan, social dan dampak moral/budaya. Atas dasar dampak itu maka nelayan di wilayah kepulauan Anambas melakukan berbagai sikap dan tindakan sebagai wujud bentuk perlawanan anti kapal asing Thailand. sejumlah. Dalam melakukan perjuangan, nelayan Anambas menggunakan beberapa bentuk dan strategi yang berbeda-beda seperti: bentuk-bentuk penentangan dengan Cara menyampaikan protes kepada pihak pemerintah (desa dan kecamatan) serta kepada aparat Angkatan Laut; melakukan perlawanan secara terbuka dengan kekerasan; demonstrasi dan mengajukan tuntutan,serta senantiasa melakukan berbagai bentuk dukungan dari berbagai pihak, pemerintah kepada ketua-ketua nelayan, pengurus RT, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

Dari perjuangan tersebut kemudian menghasilkan beberapa implikasi seperti semakin berkurangnya aktivitas nelayan Thailand di wilayah perairan Anambas; Mulai diterapkan kembali penerapan norma/aturan oleh penegak hukum di laut; terbentuknya wadah organisasi nelayan dalam Ikatan Kerukunan Keluarga Nelayan Siantan (IKKNS) sebagai media perjuangan nelayan yang memerankan terbukanya akses struktural ke jalur-jalur politik (kekuasaan), baik pemda Kabupaten Natuna, DPRD Kab. Natuna, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat sehingga perjuangan nelayan lokal dalam upaya mengamankan zona tradisional dan juga teritori Indonesia dari praktik ilegal fishing mulai mendapatkan perhatian.